

PERPECAHAN DAN SOLIDITAS ELITE PARTAI GOLKAR PADA PEMENANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2015

Sofyan Muhamad ¹⁾

¹ Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia.

E-mail Koresponden: sofyanmuhamadmip@gmail.com

Abstrak

Konflik dan perpecahan partai politik di Indonesia bukanlah isu baru, tetapi fenomena perpecahan partai telah lama terjadi sebelumnya. Di era reformasi, politik partai selalu terjebak dalam isu perpecahan yang tak pernah selesai. Salah satu partai politik tersebut adalah Golongan Karya, partai yang berkuasa selama pemerintahan Orde Baru, yang selalu mengalami konflik dan perpecahan internal partai. Pada tahun 2014, Golongan Karya kembali dilanda dinamika perpecahan dan melahirkan dualisme DPP di tingkat kepengurusan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perpecahan dan soliditas elit DPD I Golongan Karya Maluku Utara dalam memenangkan pemilihan walikota Ternate tahun 2015. dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode studi kasus kualitatif, dalam teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan penarikan kesimpulan, dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah teori partai politik institusional, dengan teori ini penulis dapat melihat perpecahan dan soliditas elit Golongan Karya kota Ternate dalam momentum pemilihan kepala daerah tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang terjadi di internal Golongan Karya Kota Ternate, yaitu terjadinya konflik struktural antara Pengurus DPD I Maluku Utara dengan DPD II Kota Ternate. Selain itu, terdapat juga kebijakan pemecatan sejumlah kader partai di Kota Ternate yang dilakukan oleh Ketua DPD I Maluku Utara. Perpecahan partai di daerah tidak terlepas dari dinamika elit politik di tingkat pusat, di mana perpecahan di tingkat DPP berdampak pada penurunan suara dalam pemilihan kepala daerah Golongan Karya Kota Ternate. Kekalahan partai pada tahun 2015 disebabkan oleh soliditas elit yang tidak terbentuk dengan baik, dan kebijakan pemecatan ini menjadi titik awal perpecahan elit partai serta perpecahan dalam kepentingan politik elemen nilai dalam pemilihan kepala daerah Kota Ternate.

Kata kunci: Perpecahan; Soliditas Partai; Pemilihan Kepala Daerah; Partai Golkar; Ternate.

Abstract

Conflict and division within political parties in Indonesia are not new issues, but the phenomenon of party fragmentation has been occurring for a long time. In the reform era, party politics have always been trapped in the never-ending issue of division. One of these political parties is Golongan Karya, the party that was in power during the New Order regime, which has always experienced internal conflicts and divisions. In 2014, Golongan Karya was once again struck by internal divisions, resulting in a dualism of the DPP at the organizational level. This research aims to examine the division and solidarity of the DPD I Golongan Karya elite in North Maluku in winning the Ternate mayoral election in 2015. In this study, the method used is a qualitative case study method, with data collection techniques using interviews, documentation, and conclusion drawing. The theory used to analyze the problem in this study is the institutional political party theory. With this theory, the author can see the division and solidity of the Golongan Karya elite in Ternate City during the 2015 regional head election. The research results indicate that there are several issues occurring within the internal structure of the Golongan Karya party in Ternate City, namely the structural conflict between the DPD I Maluku Utara Management and the DPD II Ternate City. In addition, there is also a policy of dismissing several party cadres in Ternate City carried out by the Chairman of DPD I North Maluku. The party's division in the region is inseparable from the dynamics of political elites at the central level, where the division at the DPP level impacts the decline in votes in the Golongan Karya mayoral election in Ternate City. The party's defeat in 2015 was caused by poorly formed elite solidarity, and this dismissal policy became the starting point for the party elite's division as well as the division in the political interests of value elements in the regional head election of Ternate City.

Key words: Division; Party Solidarity; Regional Head Election; Golkar Party; Ternate.

Article History:

Received : 2021-10-04

Revised : 2021-11-06

Accepted : 2021-12-03

PENDAHULUAN

Perhelatan partai politik di era reformasi Golkar pada proses suksesi Pemilu Presiden 2014 secara internal tidak memilih/memutuskan calon Presiden dari partai yang berlambang pohon beringin ini, dinamika ini bagian dari titik awal terjadinya benturan atau berbeda pendapat sehingga mengara pada konflik sesama elite dalam tubuh partai Golkar di tinggakat pusat. Konflik elite Partai Golkar yang berjalan selama 1 tahun lebih terakhir tampaknya mulai kehilangan kepercayaan rakyat terhadap partai yang bersimbol pohon beringin ini. Bergulirnya era reformasi, suksesi kekuasaan politik Partai Golkar sebetulnya tidak selalu baik. Pada tahun 2014 Partai Golongan Karya (Golkar) di massa kepemimpinan Abruzal Bakri kembali di guyur konflik di tingkat DPP, konflik ini berlangsung dalam agenda musawara nasional (Munas 2014).

Perpecahan elite di tingkat pusat merembet sampai ke tingkat DPD I Golkar Maluku Utara, dimana Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie memecat sejumlah pengurus partai yang di kota ternate diantaranya Ikbal Rurai, Jumal Wange, dan Arifin Djafar selaku Ketua DPD II Golkar Kota Ternate, Jusman Arifin, Alwi Ishak, kebijakan atas pemecatan ini di sebabkan bahwa sebagian kader partai golkar kota ternate melangkahi intruksi atas keputusan DPD I Golkar mauku utara dan membangun konsolidasi untuk memberikan dukungan kepada kubu Agung Laksono, maka partai golkar dalam suksesi pemilihan kepala daerah secara serentak pada tanggal 9 desember 2015 mendatang di warnai dengan perpecahan elite di tingkat daerah, maka dalam penelitian ini yang akan di teliti adalah melihat dinamikan perpecahan dan soliditas elite partai golkar kota ternate dalam pemenangan pemilihan walikota dan wakil walikota ternate periode 2015-2020, di samping itu penulis akan menelusuri faktor-faktor apa sajah yang melatarbelakangi sehingga partai golkar kota ternate berada pada ruang lingkup perpecahan elite dan bagaimana partai golkar kota ternate menjaga soliditas elite partai dalam momentum pilkada kota ternate tahun 2015.

LITERATURE REVIEW

Pelebagaan Partai Politik

Kajian institusionalisasi atau di kenal dengan pelembagaan partai politik berhubungan erat dengan kajian politik yang dikembangkan oleh Duverger, Sartoti membuka sebuah pendekatan baru terhadap kajian partai politik yang menekankan pada persoalan internal, sedangkan Huntington adalah seorang pakar politik yang menawarkan beberapa aspek untuk mengkaji pelembagaan partai yang pertama dilihat dari aspek pengaturan dan prosedur (aturan main), memperoleh nilai (atau menjadi sebuah nilai), dan mencapai kestabilan (atau dijalankan secara konsisten). (Noor:2015:13). Huntington (1968) menawarkan bebrapa poin penting untuk melihat atau mengukur keberadaan pelembagaan partai politik yaitu, kemampuan untuk beradaptasi, kompleksitas, otonom, dan koherensi. Yang dimaksud dengan (Adaptasi) adalah seberapa jauh kemampuan partai untuk bertahan dalam sebuah sistem politik dalam konteks hubungan kekuasaan, (kompleksitas) dia berasumsi bahwa terdapat hubungan antara sejumlah ragam subunit dan kempuan partai politik untuk mempertahankan loyalitas anggotanya, dan keadaan ini secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap penciptaan stabilitas internal di dalam partai politik, (Otonomi) lebih menekankan pada aspek tingkat perbedaan dengan kelompok-kelompok yang lain, hal ini berarti bahwa partai politik yang terlembaga harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan indenpendensi maupun secara organisasional maupun procedural, (Koherensi) di ukur berdasarkan dan keberadaan consensus internal, dia berasumsi bahwa kapasitas untuk menciptakan kesatuan, kepercayaan diri, dan siplin sangatlah penting dalam pelembagaan partai.

Panebianco (1988) mendefenisikan pelembagaan sebagai strategi organisasi untuk menciptakan soliditas atau menjadi solid, menurutnya partai yang terlembaga adalah partai yang dapat meningkatkan otonomi dari intervensi kelompok lain serta mempertahankan interdependensi antara actor-aktor internalnya. Imansyah, T. (2012). Permasalahan partai politik adalah lemahnya kelembagaan partai sehingga dinamika ini berimbas pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, belum lagi kader-kader partai yang terlibat dalam kasus korupsi masih saja di lakukan, sehingga praktek-praktek seperti ini secara tidak langsung melemahkan kelembagaan partai, regulasi kepartaian yang ada belum berpengaruh

signifikan dalam penguatan kelembagaan partai, lemahnya kelembagaan partai yang ada saat ini lebih disebabkan oleh sistem internal partai yang belum modern. Romli, L. (2016).

Kajian tentang pelembagaan partai adalah sebuah kajian yang dilakukan oleh Randall dan Svasand. Mereka berpendapat bahwa pelembagaan seharusnya di pahami sebagai proses di mana partai menjadi mapan dalam pola perilaku, di dasarnya dari pemahaman ini keduanya telah meletakkan empat unsur atau dimensi untuk mengetahui pelembagaan partai yaitu, kesisteman, influsi nilai, otonomi, dalam pengambilan keputusan, dan reifikasi. (Randall dan Svasand:2002:12-13). Partai politik di era reformasi melahirkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, adanya persoalan yang paling mendasar yang membawa partai politik pada ruang lingkup perpecahan sehingga secara kelambagaan tidak berfungsi dengan baik ada tiga masalah yang harus di pecahkan yaitu, Ideologi dan platform, kohesifitas dan pengelolaan konflik, rekrutmen politik dan pembentukan kader. Efriza (2012:241). Pelembagaan partai politik sangat di pengaruhi oleh sifat dari peraturan partai, dalam pengerian ini bahwa sebagai lembaga demokrasi yang bentuk, operasi dan ekstensinya di atur dalam undang-undang. Kemampuan suatu partai politik merebut dan mempertahankan dukungannya di suatu pihak dan mengkonsolidasikan diri pada pihak lain antara lain, ditentukan oleh tingkat kelembagaan atau isntitusionalisasi partai itu sendiri.

Perpecahan Dan Soliditas Elite Partai

Beberapa kalangan dalam dunia akademis telah membahas fenomena perpecahan dan soliditas partai politik secara mendalam. Masalah perpecahan dan soliditas partai politik telah di bahas dari berbagai sudut pandang. Yang di maksud dengan perpecahan adalah sebuah internal/institusi sebua partai terpeca atau terbagi beberapa faksi yang kemudian saling mengklaim sebagai pihak yang paling benar atau sah.(Lewis Fickett) mengemukakan bahwa perpecahan dalam partai politik adalah persoalan pemahaman ideology sehingga melahirkan konflik secara personal di antara elite partai. Dilain (Martin Bull) meyakini bahwa perselisihan tentang orientasi dan strategi partai untuk mencapai tujuan adalah faktor-faktor yang patut dipertimbangkan manakalah membahas latar belakang perpecahan partai. Dalam pandangan ini dia berkesimpulan bahwa dalam suatu isntitusi partai terdapat kelemahan di antaranya lemahnya mekanisme disiplin dan digunakannya model rekrutmen partai berbasis massa lebih cenderung mengurangi disiplin kader dan pada akhirnya memberikan peluang munculnya konflik internal.(Noor :2015:19-21).

Partai Politik

Sejarah Kehidupan dan pertumbuhan partai politik mulain di kenal dalam bentuk yang moderen di Eropa dan Amerika Serikat sekitar Abad ke-19 bersamaan mulain dikenal sistem pemilihan dan parlementertaria, sepenjang perkembangan dan kemajuan sistem pemilihan dan parlementaria ini, maka berkembang pula sistem kepartain politik. Istilah partai yang melekat pada partai politik di gunakan untuk setiap bentuk kelompok organisasi yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik baik melalui pemilihan demokratis atau revolusi. (Thoha : 2015 : 16). Budiarto: 2008 : 403, Mendefinisikan Parai politik berangkat suatu Negara demokrasi membentuk wada organisasi politik mereka agara dapat menyatukan orang-orang yang mempunyai orentasi mereka dapat terkonsolidasikan. Dapat membuat pengaru mereka bisa terbuka lebar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan, Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan dalam bersifat idil. Signum Neuman mengemukakan bahwa organisasi partai politik adalah bagian dari perkumpulan aktor politik yang berusaha untuk memperoleh kekuasaan dalam ruang lingkup pemerintahan serta menggalang dukungan rakyat sebagai kekuatan basis dalam konteks persaingan dengan satu kelompok atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Labolo dan Tegu :2017:181 bawha partai politik seyoginya merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Namun saat ini kita rasakan partai politik telah mulai kehilangan arah dan tujuannya. Memang tidak dapat di pungkiri tujuan sederhana dari setiap partai politik adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan seperti yang di katakana oleh Carl J. Friedrich ataupun pendapat dari La Palobara dan Anderson. Pada intinya mereka mengtakan bahwa organisasi partai politik merupakan sarana untuk

menempatkan wakil-wakilnya di pemerintahan melalui mekanisme pemilu. Namun realitas yang terjadi, adalah terkadang partai politik lupa akan fungsinya karena terlalu asik dengan tujuan pragmatismenya tersebut.

Perpecahan Partai Golkar

Perpecahan partai Golkar di tingkat DPP adalah sebuah permasalahan yang cukup serius sebab dinamika perpecahan berdampak ketingkat kepengurusan DPD seluruh Indonesia, sehingga melahirkan faksionalisme dalam internal partai Golkar, salah satu daerah yang kena dampaknya adalah DPD Golkar Maluku Utara seharusnya elite partai di tingkat lokal lebih mengedepankan mekanisme dalam proses penyelesaian masalah yang melanda internal partai di tingkat DPP, tetapi dinamika yang terjadi di Maluku utara selama permasalahan berjalan sudah melahirkan konflik di antara elite yang ada di Maluku utara, saling mengklaim antara sesama elite sehingga perpecahan ini berujung pada pemecatan sejumlah kader yang dianggap aspirasi yang di suarkan telah melanggar intruksi partai pada hal jika dilatih perhelatan yang terjadi tingkat pusat belum ada titik penyelesaian, maka barang tentu perpecahan ini akan berdampak pada soliditas partai ketika menghadapi pilkada serentak 2015 di Provinsi Maluku Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan metode studi kasus` (case studies) kualitatif, ada beberapa definisi mengenai pendekatan studi kasus (case studies) menurut Suharsimi (2002:120) adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, teliti, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perpecahan Elite Partai Golkar Kota Ternate

Pertikaian dalam internal partai politik khususnya di Indonesia selalu saja mengara pada dinamika perpecahan para elite, dinamika semacam ini sering kali di lihat dari cara elite partai politik menafsirkan platform dan kebijakan internal atas isu-isu tertentu ini sangat berpengaruh dalam membentuk pragmatisme elite politik yang akan berpotensi merusak soliditas partai politik. Kekuasaan sering kali dijadikan sebagai tujuan utama elite partai politik, walaupun tujuan dari partai politik adalah merebut dan mempertahankan kekuasaan, di namika ini membuat para elite parpol dan politisi kemudian memanipulasi orientasi utama perjuangan parpol yang seharusnya ialah berkontribusi dalam membangun tatanan masyarakat yang ideal berdasarkan platform atau ideology yang dianut, dalam pergeseran orientasi ini dengan sendirinya mengurangi peran ideology dalam membangun militansi dan soliditas partai politik.

Perpecahan yang terjadi dalam tubuh partai Golkar bermula di tingkat DPP dan melahirkan dua kubu yaitu kubu Abrizal Bakire dan Agung Laksono, dan Golkar Maluku utara menganggap bahwa dinamika ini hanya akan terjadi di tingkat pusat tidak berpengaruh ketingkat provinsi maupun kab/kota yang ada di Indonesia, perpecahan internal partai Golkar memakan waktu hampir 1,5 tahun selama perseteruan ini terus berlangsung partai Golkar menjadi tren topik yang selalu saja di wajanakan baik dari kalangan politisi maupun kalangan akademisi di tanah air, banyak yang beranggapan dinamika perpecahan yang melimpah partai Golkar adalah bagian dari proses kedewasaan para elite partai untuk jeli sehingga dalam proses penyelesaian harus benar-benar berada pada koridor organisasi partai.

Dalam pernyataan ini yang disampaikan oleh korwil Maluku dan Maluku utara adalah bagian dari sebuah iktikar politik, tetapi secara tidak langsung perpecahan di tingkat DPP berpengaruh ketingkat daerah sehingga perselisihan elite di tingkat lokal pun menuai kontrak atas perpecahan di tingkat pusat, berbagai macam maneuver politik yang di lakukan oleh elite politik partai Golkar yang ada di kota ternate membuat situasi internal khususnya di Maluku utara makin memanas sehingga melahirkan faksi yang mengatasnamakan mereka adalah bagian dari pengurus pro Agung Laksono.

Pentingannya konsolidasi demokrasi di jadikan sebagai dasar, arah dan tujuan partai politik semua itu sangat jelas di tuangkan dalam UU No 2 tahun 2017 tentang partai politik, dalam pasal 10 UU Partai politik menjelaskan bahwa orientasi partai politik ialah memajukan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila serta menjaga mudaya dan etika politik di tanah

air, hal ini diperkuat dalam pasal 27 dan 28 AD/ART partai Golkar menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan pada hakikatnya dilakukan secara demokratis dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam aturan organisasi partai.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa masalah yang terjadi di internal Golongan Karya Kota Ternate, yaitu terjadinya konflik struktural antara Pengurus DPD I Maluku Utara dengan DPD II Kota Ternate. Selain itu, terdapat juga kebijakan pemecatan sejumlah kader partai di Kota Ternate yang dilakukan oleh Ketua DPD I Maluku Utara. Perpecahan partai di daerah tidak terlepas dari dinamika elit politik di tingkat pusat, di mana perpecahan di tingkat DPP berdampak pada penurunan suara dalam pemilihan kepala daerah Golongan Karya Kota Ternate. Kekalahan partai pada tahun 2015 disebabkan oleh soliditas elit yang tidak terbentuk dengan baik, dan kebijakan pemecatan ini menjadi titik awal perpecahan elit partai serta perpecahan dalam kepentingan politik elemen nilai dalam pemilihan kepala daerah Kota Ternate.

Reference

- Arsyad, A. & Kambo, G. 2013 Konflik ketiga elit pada pemilihan Walikota & Wakil Walikota Makasar 2013.
- Astriya, D. (2014). Konflik Internal Partai Amanat Nasional (PAN) di Provinsi Lampung Tahun 2013 (Studi Kasus Pemberhentian Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN
- A Padallangan, M. (2012). kekalahan Partai Golkar Pada Pemilu di Kabupaten Toraja Utara 2010 (Doctoral dissertation).
- Asmadianto, A., & Nurmandi, A. (2016). Konflik Internal Dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Barat Menghadapi Pemilu dan Pilkada di Sulawesi Barat 2014). *Journal of Governance and Public Policy*.
- Andriadi, Fayakhun, 2014. *Golkar Transformer* RMBOOKS Graha Pena, Jakarta.
- Asep, Nurjana, 2013. *Ketidak stabilan Electoral Dan Kehancuran Politik Aliran UMM* Press, Malang.
- Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Bogdan, Robert C and Biklen. 1982 *Qualitative Research For Education an Introduction To Theori and Methods* Boston Alin And Bacon.
- Efriza, 2012. *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Cv Alfabeta, Bandung
- Effendi, A. T. (2015). Dampak Konflik DPP Partai Golkar Terhadap DPD Partai Golkar Kota Surabaya (Doctoral dissertation Universitas Erlangga).
- Eristyawan, F. N. (2013). *Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa (Studi Kasus Kemerosotan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Jawa Timur)*
- Noor, Firman. 2015. *Quo Vadis Demokrasi Kita* " PT Wahana Semesta Intermedia Jakarta.
2015. *Perpecahan Dan Soliditas Partai Islam Di Indonesia* LIPI Press Jakarta.
- Firmanzah, 2011. *Mengelola Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi* Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Faisol, A. 2014. *Konflik internal PDI-Perjuangan Tahun 2005-2009*
- Kaunar, A. S,IP (2011). *Pusaran Politik Dalam Rekrutmen Kandidat Partai Golkar (Studi Tentang Rekrutmen Kandidat Oleh Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2010-2015)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Huntington, P. Samuel 2004. *Tertib Politi, Pada Masyarakat Yang sedang Beruba* PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Halid, Nurdin. 2016. *Suara Golkar Suara Rakyat* Jetpress Jakarta.
- Halim Abdullah, 2014. *Politik Lokal, Pola, Aktor & Alur Dramatikanya* LP2B Yogyakarta.
- Imansyah, T. (2012). *Regulasi partai politik dalam mewujudkan penguatan peran dan fungsi kelembagaan partai politik*. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Joko, J. Prihatmoko Moesafa. 2008 *Menangkan Pemilu Di Tengah Oligarki Partai Pusta* Pelajar Yogyakarta.